

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah

Zainudin¹, Rika Destriyadani²,

Email: Zainudinugp@gmail.com, Rikadestriya68@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Gajah Putih Takengon, Indonesia.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih Takengon, Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Aktivitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Masalah difokuskan pada cara mengelola keuangan melalui Realisasi APBD. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori perhitungan rasio keuangan dari Halim. Data-data dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan yaitu data berupa dokumentasi yang ada di Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan dianalisis secara Kualitatif Komparatif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali, Rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, rasio efisiensi keuangan tergolong tidak efisien, aktivitas pengelolaan keuangan baik dan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi disetiap tahunnya.

Kata Kunci: Aktivitas Pengelolaan Keuangan; Realisasi APBD; Rasio Keuangan.

Abstract.

This article aims to find out the Financial Management Activities of Central Aceh Regency. The problem is focused on how to manage finances through the realization of the APBD. In order to approach this problem, a reference is used to the theory of calculating financial ratios from Halim. The data was collected through a literature study, namely data in the form of documentation at the Central Aceh Regency Finance Office and analyzed qualitatively and comparatively. The results of the study can be concluded that the regional financial independence ratio is still very low, the effectiveness ratio is categorized as quite effective, the financial efficiency ratio is classified as inefficient, the financial management activities are good and the growth ratio shows growth that fluctuates every year.

Keywords: Financial Management Activities; APBD Realization; Financial Ratios.

PENDAHULUAN

Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Zamzami & Gowon, 2021). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. (Adnan & Teniro, 2021) Pemerintah daerah selaku pengelola dana public harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki system informasi yang handal. (Defitri, 2018), (Kromen et al., 2023)

Pengelolaan Keuangan Daerah penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertugas mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat. (Halim, 2004) dan (Abdullah, 2004) Pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan suatu pemerintahan penting karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa keuangan yang cukup untuk memberikan pelayanan, Pembangunan dan keuangan ini merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Rachmawati & Nuryana, 2020) Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu

daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Salah satu cara untuk menganalisa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara melihat aktivitasnya melalui Laporan Realiasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. (Kurniawan & Fachri, 2023) Untuk mengetahui aktivitas pengelolaan tersebut dapat menggunakan analisis keuangan daerah dengan menganalisis rasio keuangan, diantaranya Rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Kerangka Pikir

Adapun peralatan yang digunakan untuk mengukur aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu memerlukan laporan keuangan sebagai masukan awal untuk menganalisis aktivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan beberapa rasio. Adapun rasio-rasio yang digunakan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan (Susanto, 2019). Untuk lebih jelasnya dibuatkan gambar sebagai berikut



Gambar 1. Kerangka Gambar

HASIL PENELITIAN**1. Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan Tingkat kemampuan daerah dalam membiayai

sendiri kegiatan pemerintahannya. Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus rasio kemandirian dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Kemandirian Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Total Pendapatan Asli daerah (Rp)	Total Hasil Pendapatan Ekstern (Rp)	Rasio	Ket
2020	193.589.892.832,84	1.171.544.048.254,00	16,52 %	instruktif
2021	165.060.983.456,90	1.140.527.053.390,00	14,47 %	instruktif
2022	176.813.197.580,42	1.077.663.103.422,49	16,41 %	instruktif
2023	175.333.731.663,88	1.108.906.399.851,00	15,81 %	instruktif

Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 16,52 %. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,05% dari 16,52 % menjadi 14,47%. Kemudian pada 2022 keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,94 % sehingga dipeoleh rasio 16,41 %. selanjutnya pada 2023 rasio keuangan daerah kembali mengalami penurun sebesar 0,6% menjadi 15,81 %.

Dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Aceh tengah masih sangat bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan

kemampuan dalam membiayai pemerintahnya hanya mencapai persentase dibawah 25 % yang tergolong dalam kategori instruktif dilihat dari pendapatan asli daerah yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan dari pihak ekstren.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus rasio kemandirian dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Ket
2020	179.676.451.210,00	193.589.892.608,84	107,74 %	sangat efektif
2021	168.257.872.828,00	165.060.983.456,90	98,10 %	efektif

2022	217.856.216.870,00	176.813.197.580,42	81,16 %	cukup efektif
2023	178.750.776.985,00	175.333.731.663,88	98,09 %	efektif

Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio efektivitas keuangan daerah sebesar 107,74 %. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,64 % dari 107,74 % menjadi 98,10 %. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 16,94% menjadi 81,16%. Selanjutnya pada tahun 2023 efektivitas meningkat 16,93 % dari 81,16 % sehingga diperoleh rasio keuangan sebesar 98,09 %.

Dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Aceh tengah tahun 2020 sangat efektif karena efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2021, 2022

dan 2023 cukup efektif karena efektivitasnya dibawah 100 % oleh karena itu aktivitas pengelolaan keuangan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah masih belum cukup baik karena belum mengimbangi target yang telah ditetapkan.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi. Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus rasio kemandirian dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Ket
2020	1.387.140.459.762,33	193.589.829.608,84	716,54%	tidak efisien
2021	1.351.018.822.158,52	165.060.983.456,90	818,50%	tidak efisien
2022	1.265.676.313.952,68	176.813.197.580,42	715,83%	tidak efisien
2023	1.250.638.372.213,00	175.333.731.663,88	713,29%	tidak efisien

Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 716,54 %. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 101,96 % dari 716,54 % menjadi 818,50 %. Kemudian pada tahun 2022 efisiensi mengalami penurunan sebesar 102,67 % dari 818,50% menjadi 715,83 %. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali

mengalami penurunan sebesar 2,54 % dari 715,83 % sehingga diperoleh rasio sebesar 713,29 %.

Dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Aceh tengah dalam upayanya mengumpulkan pendapatan asli daerah dikategorikan tidak efisien karena rasio yang dicapai masih lebih daeri 100 %.

Semakin kecil rasio menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja Operasi) dan belanja modal. Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus rasio kemandirian dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

4. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah

Tabel 4. Rasio Aktivitas Rasio Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Total Belanja Rutin (Rp)	Total Belanja Pembangunan (Rp)	Rasio
2020	811.187.145.421,33	249.102.547.211,00	325,64 %
2021	830.857.160.580,39	204.451.315.164,13	406,38 %
2022	830.550.752.354,68	165.188.456.188,00	502,79 %
2023	854.535.147.166,00	110.592.222.339,00	772,69 %

Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio aktivitas keuangan daerah sebesar 325,64 %. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 80,74 % dari 325,64 % menjadi 406,38 %. Kemudian pada 2022 keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 96,41% sehingga dipeoleh rasio 502,79 %. selanjutnya pada 2023 rasio keuangan daerah kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 269,9 % dari 502,79 % menjadi 772,69 %.

Dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas keuangan daerah Kabupaten Aceh tengah dalam kategori baik karena

pemerintah daerah mampu mengoptimalkan alokasi dananya dilihat dari belanja modal dan belanja operasi tidak melebihi dari yang ditargetkan.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya.

Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus rasio kemandirian dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PAD	-	(14,74) %	7,12 %	0,84 %
2	Pertumbuhan Pendapatan	-	(4,75) %	(5,55) %	2,35 %
3	Belanja Rutin	-	2,42 %	(0,04) %	2,89 %
4	Belanja Modal	-	(17,92) %	(19,20) %	(33,05) %

Data diolah peneliti, 2024

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan keuangan Kabupaten Aceh tengah dari tahun 2020 sampai 2023 yang dihasilkan dari perhitungan rasio pertumbuhan. Selanjutnya pertumbuhan PAD terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selanjutnya pertumbuhan pendapatan ditahun 2021 dengan persentase 4,75 lalu naik ditahun 2022 sampai kemudian turun kembali ditahun 2023 dengan persentase 2,89 %. Pertumbuhan belanja rutin menunjukkan persentase ditahun 2021 sebesar 2,42 % lalu turun menjadi 0,04 % ditahun 2022 sampai kemudian naik ditahun 2023 dengan persentase 2,89 %. Untuk pertumbuhan belanja modal rasio

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan pertumbuhan dengan

dengan persentase 17,92 % ditahun 2021 terus mengalami kenaikan sampai ditahun 2023 dengan persentase 33,05 %.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan APBK Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2020-2023 menunjukkan pertumbuhan yang terus berpluktuasi disetiap tahunnya. Total pendapatan tidak diikuti dengan kenaikan PAD. Total belanja rutin masih cukup besar. Dapat juga dilihat dari rasio pertumbuhan belanja rutin dan belanja modal tidak berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan daerahnya persentase yang terus berpluktuasi (perubahan naik turun atau ketidaktetapan pada variabel tertentu yang terjadi karna suatu mekanisme) disetiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *Kinerja*, 8(2), 209–210.
- Adnan, A. D., & Teniro, A. (2021). Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah. *Biram Samtani Sains*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.55542/jbss.v5i1.88>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64–75. <http://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 460–468. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4.1463>
- Kurniawan, E., & Fachri, H. (2023). Intensitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Reralisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sebagai Rasio. *Biram Samtani*

- Sains*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.55542/jbss.v7i2.753>
- Rachmawati, N., & Nuryana, I. (2020). Peran literasi keuangan dalam memediasi pengaruh sikap keuangan, dan teman sebaya terhadap perilaku pengelolaan keuangan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 166–181. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37246>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>
- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening:(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Ja. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(3), 136–148.